

**PEMBERDAYAAN PT DIRGANTARA INDONESIA SEBAGAI INDUSTRI  
PERTAHANAN STRATEGIS DALAM PEMENUHAN ALUTSISTA TNI ANGKATAN  
UDARA**

**EMPOWERING PT DIRGANTARA INDONESIA AS A STRATEGIC DEFENSE  
INDUSTRY IN THE FULFILLMENT OF INDONESIA AIR FORCE DEFENSE  
EQUIPMENT**

Animus Grahadi Perdana Putra<sup>1</sup>, Tatan Kustana<sup>2</sup>, Wibisono Poespito Hadi<sup>3</sup>

Prodi Strategi Pertahanan Udara Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan

(grahadianimus@gmail.com, tatankustana@gmail.com,

wibisonospdstrahan@gmail.com)

**Abstrak** -- Industri pertahanan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung dan meningkatkan kekuatan pertahanan suatu negara, terlebih dalam era modern saat sekarang ini. Negara yang memiliki industri pertahanan yang maju akan mempunyai kemampuan lebih baik dalam kekuatan pertahanannya. PT Dirgantara Indonesia merupakan satu-satunya industri strategis Indonesia yang bergerak dibidang kedirgantaraan. Sebagai satu-satunya Industri yang berbasis pada bidang kedirgantaraan, harapan awal TNI Angkatan Udara adalah menjadikan PT Dirgantara Indonesia sebagai salah satu sumber utama dari pelaksanaan dukungan kesiapan operasional pesawat-pesawat TNI Angkatan Udara selain sudah tentu sumber-sumber lain yang ada diluar negeri. Melihat dari kemampuan yang dimiliki PT Dirgantara Indonesia baik dilihat dari manajemen maupun kemampuan teknis, maka diharapkan mampu memproduksi komponen-komponen alutsista, pesawat terbang dengan berbagai ukuran yang sesuai spesifikasi yang diperlukan TNI AU yang dapat terkendala akibat embargo. Faktor penghambat pemberdayaan industri pertahanan dalam mendukung kemandirian Alutsiswa yaitu belum adanya persamaan persepsi antar pihak dalam memandang pembangunan pertahanan negara, banyaknya kebijakan yang tidak tepat dalam pembangunan industri pertahanan dan modernisasi terhadap mesin/fasilitas produksi industri pertahanan, lemahnya *political will* pemerintah dan komitmen TNI untuk menggunakan produksi dalam negeri, dan kemampuan teknologi yang dimiliki masih tergantung kepada Negara *principal*.

**Kata kunci:** *Pemberdayaan, Industri Pertahanan, Alutsista*

**Abstract** -- The defense industry is one of the important factors in supporting and enhancing a country's defense power, especially in the modern era today. Countries that have an advanced defense industry will have better capabilities in their defense forces. PT Dirgantara Indonesia is the only Indonesian strategic industry engaged in aerospace. As the only industry based on aerospace, the Air Force's initial hope was to make PT Dirgantara Indonesia as one of the main sources of implementation of operational readiness for Indonesian Air Force planes, besides of course other sources outside the country. Seeing from the capabilities of PT Dirgantara Indonesia both in terms of management and

---

<sup>1</sup> Air Defense Strategy Study Program, Indonesia Defense University, grahadianimus@gmail.com

<sup>2</sup> Air Defense Strategy Study Program, Indonesia Defense University, tatankustana@gmail.com

<sup>3</sup> Air Defense Strategy Study Program, Indonesia Defense University, wibisonospdstrahan@gmail.com

*technical capabilities, it is expected to be able to produce defense equipment components, aircraft of various sizes that meet the specifications required by the Air Force which can be constrained due to the embargo. Inhibiting factors for empowering the defense industry in supporting the independence of students is the lack of equality of perception between parties in looking at national defense development, the number of improper policies in defense industry development and modernization of defense industry machinery / facilities, the government's weak political will and the TNI's commitment to use domestic production, and the technological capabilities possessed are still dependent on the State principal.*

**Keywords: Empowerment, Defense Industry, Defense Equipment**

## Pendahuluan

Setelah berakhirnya perang dingin pada awal 1990-an, polaritas kekuatan dunia tidak hanya berfokus pada dua kekuatan besar di Blok Barat dan Blok Timur, ancaman keamanan dunia pun sedikit demi sedikit mengalami pergeseran. Sementara pada masa perang dingin ancaman tradisional berupa agresi militer menjadi persoalan utama keamanan, kini ancaman terhadap keamanan semakin berkembang. Meningkatnya ancaman-ancaman baru dalam dinamika politik internasional, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar pasca-perang dingin telah memunculkan fenomena *self-defense* yang makin kuat antara masing-masing negara di dunia. Setiap negara di dunia ternyata tidak ingin mendapat gangguan dari pihak lain, oleh sebab itu negara-negara tersebut akan senantiasa meningkatkan kemampuan militernya untuk pertahanan nasional. Militer merupakan salah satu elemen paling penting dalam pertahanan yang dimiliki oleh negara. Dengan kualitas dan

kuantitas militer, sebuah negara dapat menunjukkan seberapa besar kemampuan negara tersebut dalam usahanya mencapai kepentingan nasional.

Industri pertahanan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung dan meningkatkan kekuatan pertahanan suatu negara, terlebih dalam era modern saat sekarang ini. Negara yang memiliki industri pertahanan yang maju akan mempunyai kemampuan lebih baik dalam kekuatan pertahanannya. Kekuatan pertahanan suatu negara akan dapat dikatakan mumpuni bila ditunjang dengan kemampuan negara tersebut dalam memproduksi berbagai macam sarana dan prasarana pendukung pertahanan melalui industri pertahanan yang dimilikinya.

Berdasarkan data yang telah dirilis oleh Markas Besar Tentara Nasional Indonesia tahun 2010, 70% alutsista Indonesia berada dalam kondisi yang sudah tua atau minimal berusia dua puluh

tahun.<sup>4</sup> Hal tersebut diakibatkan karena adanya kendala yang dihadapi Indonesia dalam proses pengadaan dan pemeliharaan alutsista. Misalnya dalam perawatan dan perbaikan alutsista yang terkadang terbentur pada ketersediaan suku cadang akibat embargo dan ketersediaan anggaran yang diakibatkan oleh krisis, sehingga perencanaan perbaikan alutsista yang telah direncanakan tidak dapat berjalan dengan semestinya.

Namun kejadian tersebut memang seharusnya menjadi hikmah bagi pemerintah Indonesia bahwa ketergantungan kepada negara-negara tertentu dalam perolehan sistem senjata dan pendukungnya dapat mengakibatkan hilangnya kemampuan yang dimiliki, apabila dijatuhkan sanksi embargo. Hal ini juga dapat dijadikan *starting point* untuk segera memperdayakan industri dalam negeri, agar mampu mencukupi kebutuhan militer Indonesia.

Indonesia memiliki mimpi besar terhadap kemandirian Industri pertahanan yang mengacu pada UU No.16/Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan maka dari itu Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) pun menyusun tujuh program

nasional industri pertahanan yang mencakup: Pengembangan Jet Tempur KF-X / IF-X, Pembangunan Kapal Selam, Pembangunan Industri Propelan, Pengembangan Roket Nasional, Pengembangan Rudal Nasional (peluru kendali), Pengembangan Radar Nasional dan Pengembangan Tank Sedang (*medium tank*).<sup>5</sup>

Kementerian Pertahanan yang bekerjasama dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan akan mendukung pengembangan dan pembuatan alutsista pertahanan yang telah direncanakan oleh KKIP, dalam hal ini Kementerian Pertahanan bekerjasama dengan Kementerian BUMN terus mendorong dan mengawasi pencapaian terhadap revitalisasi industri pertahanan. Kementerian Pertahanan juga mendorong Kementerian Keuangan untuk memberikan insentif khusus bagi industri pertahanan nasional yang berkontribusi besar bagi modernisasi alutsista pertahanan Indonesia, seperti : PT Dirgantara Indonesia (pesawat), PT PAL (kapal laut), PT PINDAD (alutsista darat),

---

<sup>4</sup> Mabes TNI, 2010, Alutsista TNI, <http://www.tni.mil.id>, 30 Maret 2018.

<sup>5</sup> Falah, 2015, Membangun Industri Pertahanan Untuk Militer & Non-Militer,;

<http://infopublik.id/read/107004/-membangun-industri-pertahanan-untuk-militer-&-non-militer-.html>, 30 Maret 2018.

PT Dahana (bahan peledak) dan industri pertahanan nasional lainnya.<sup>6</sup>

Untuk membangun sebuah industri pertahanan yang mandiri memang tidak mudah, diperlukan berbagai macam upaya dan sumber daya yang tidak sedikit. Disamping memerlukan dana yang besar, juga dibutuhkan penguasaan teknologi tinggi. Hal tersebut tidak dapat dilaksanakan dalam waktu yang singkat, serta memerlukan kerjasama berbagai pihak. Kementerian Pertahanan Indonesia sebagai penanggung jawab utama sistem pertahanan Indonesia memerlukan kerjasama dengan pihak lain untuk mewujudkan pengembangan industri pertahanan yang mandiri. Penguatan industri nasional untuk pembangunan pertahanan memerlukan kerja sama di antara tiga pilar industri pertahanan, yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan serta Perguruan Tinggi, Industri, dan pihak Kemhan/TNI, dengan dibentengi oleh kebijakan nasional yang jelas untuk menggunakan produk-produk hasil dari putra-putra terbaik bangsa.<sup>7</sup>

Hal tersebut merupakan bentuk harapan pemerintah untuk

mengembangkan industri pertahanan nasional serta memodernisasi alat utama sistem persenjataan, yaitu dengan melakukan skema *transfer of technology* (TOT) dengan negara-negara maju dalam bidang tersebut. Dalam pelaksanaannya jika persenjataan yang diperlukan belum dapat disediakan dalam negeri, maka pengadaannya dapat dilakukan dari luar negeri dengan mekanisme *joint production* ataupun alih teknologi.<sup>8</sup> Dengan demikian user akan mendapatkan manfaat yang maksimal, baik dalam pemeliharaan, maupun *sharing knowledge* yang dapat memperkaya pengetahuan para pelaku industri pertahanan dalam mengejar perkembangan teknologi militer didunia saat ini.

PT. PINDAD sendiri dipercayakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengembangkan dan membuat Medium Tank yang bekerjasama dengan industri pertahanan asal Turki yaitu FNSS Defense Systems Turki. PT.PINDAD dipilih untuk menjalankan kerjasama tersebut karena industri pertahanan ini merupakan Industri pertahanan nasional (BUMN) yang telah memiliki banyak pengalaman

---

<sup>6</sup> Kina Karya Indonesia, 2011, Pemerintah Perkuat Industri Pertahanan Strategis, <http://www.kemenperin.go.id/download/1268>, 30 Maret 2018.

<sup>7</sup> Departemen Pertahanan Republik Indonesia, 2008, Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008,

Jakarta: Departemen Pertahanan Republik Indonesia, 30 Maret 2018.

<sup>8</sup> Fikri, 2012, PT Dirgantara Indonesia Produksi 7 Helikopter TNI, <http://www.tempo.co/read/news/2012/03/02/173387618/PT-Dirgantara-Produksi-7-Helikopter-TNI>, 30 Maret 2018.

dalam hal membuat dan menciptakan Alutsista bagi TNI, Industri dalam negeri ini juga telah menguasai teknologi *wheeled propulsion systems* seperti pada Panser ANOA 6 X 6 yang telah di produksi mencapai kurang lebih 260 unit kendaraan dengan berbagai varian yang dibuat sesuai dengan permintaan dan kebutuhan pelanggan dan panser ini telah diakui kehebatannya didunia,<sup>9</sup> hingga saat ini Panser Anoa milik PT.PINDAD Indonesia masih digunakan dalam misi perdamaian PBB misalnya di Lebanon dan Negara-negara konflik lainnya.

Kerjasama PT.PINDAD dan FNSS Turki dalam pembuatan Tank Medium ini memakai sistem TOT (*transfer of technology*) yang dimana dengan melalui sistem kerjasama tersebut Indonesia berharap dapat memberikan titik terang bagi Indonesia untuk mengembangkan kapasitas Alutsista yang canggih, dan adanya transfer teknologi antara PT.PINDAD Indonesia dengan FNSS *Defense Systems* Turki nantinya para ahli teknologi Indonesia bisa mewujudkan keinginan kemandirian pertahanan Indonesia, khususnya dalam pembuatan Tank Medium, sedangkan FNSS *Defense*

*Systems* Turki berupaya untuk meningkatkan posisi industri militernya di kawasan pasar kendaraan lapis baja Asia.

Indonesia dalam mewujudkan kemandirian pertahanannya tentunya membutuhkan adanya transfer teknologi, hal tersebut yang mendorong terlaksananya kerjasama pertahanan Indonesia dan Turki terus berlanjut karena Indonesia ingin kembali menghasilkan Alutsista buatan industri dalam negeri, hal ini terbukti dengan kesuksesan Indonesia dalam membuat dua kapal perang pesanan militer Filipina jenis *Strategic Sealift Vessel (SSV)* yang merupakan hasil dari transfer teknologi dalam pembuatan kapal perang jenis *Landing Platform Dock (LPD)* dengan Korea Selatan.<sup>10</sup>

Namun, pada tahun 2016 dan 2017 PT Dirgantara Indonesia tidak dilibatkan dalam industri pertahanan yang diadakan oleh Markas Besar Angkatan Udara Dinas Pengadaan. Hal ini terlihat dari laporan perkembangan proses pengadaan barang/jasa Subdisadaaero, dimana total nilai proyek tahun 2016 sebesar Rp 20.113.054.920 dan tahun 2017 sebesar Rp 65.850.221.251. Perusahaan yang terlibat antara lain PT PINDAD dan PT Sari Bahari.

---

<sup>9</sup> PT.PINDAD, 2015, Kendaraan Khusus, <https://www.pindad.com/special-vehicles>, 30 Maret 2018.

<sup>10</sup> Indomiliter, 2015, Strategic Sealift Vessel: Ini Dia Kapal Perang Pertama Buatan PT.PAL Yang DI

Ekspor, <http://www.indomiliter.com/strategic-sealift-vessel-bertonase-besar-ini-dia-kapal-perang-pertama-buatan-pt-pal-yang-di-ekspor/>, 30 Maret 2018.

## Bahan dan Metode

Untuk meneliti tulisan ini, penulis menggunakan metode kualitatif, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi<sup>11</sup>.

Teknik pengumpulan data langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah pengumpulan data. Adapun teknik yang dilakukan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan *Library Research*.

Analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan. Analisis data dikerjakan dalam bentuk *Data Reducton* (Reduksi Data), *Data Display*

(penyajian data), dan *Conclusion Drawing/ Verification*.

## Hasil Penelitian

### Kerja Sama PT Dirgantara Indonesia dan TNI AU Selama Ini

Sebagai satu-satunya Industri yang berbasis pada bidang kedirgantaraan, harapan awal TNI Angkatan Udara adalah menjadikan PT Dirgantara Indonesia sebagai salah satu sumber utama dari pelaksanaan dukungan kesiapan operasional pesawat-pesawat TNI Angkatan Udara selain sudah tentu sumber-sumber lain yang ada diluar negeri. Dihadapkan pada kebijakan beberapa negara yang sering melakukan embargo terhadap peralatan militer TNI, harapannya adalah bahwa PT Dirgantara Indonesia yang bergerak dalam bidang kemitraan Udara dapat mendukung TNI khususnya TNI AU, dimana PT Dirgantara Indonesia juga memiliki latar belakang sejarah TNI AU sebagai cikal bakalanya. Kerjasama yang telah dilaksanakan antara TNI AU dengan PT Dirgantara Indonesia antara lain adalah:

1. Pengadaan 6 pesawat Angkut CN-235-100M pada tahun 1996.

---

<sup>11</sup> Sugiyono, 2015, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, hlm.15

2. Pengadaan 3 pesawat Maritime Patrol CN-235MP pada tahun 2002<sup>12</sup>. Dari tiga pesawat CN 235 MPA yang dipesan oleh TNI AU hanya satu yang dikirimkan, satu pesawat itupun kondisinya banyak mengalami permasalahan terutama pada *mission control* dalam *cabin* pesawat.
3. Pengadaan 4 Helikopter Super Puma NAS-332 VIP pada tahun 1998<sup>13</sup>.
4. Pengadaan 12 Helikopter Super Puma NAS-332-L2 pada tahun 1998<sup>14</sup>.
5. Program *Re-Engine* 3 Helikopter Puma SA-330 pada tahun 2000<sup>15</sup>. Program *re-engine* pesawat Puma ini mengalami permasalahan beberapa tahun setelah pengoperasian pada sistim kelistrikan pesawat. Pada tahun 2007 helikopter jenis ini mengalami *crash landing* di Terpones Papua. Beruntung seluruh awak pesawat selamat meskipun ada yang mengalami cedera.
6. Pengadaan 9 CN 295 dimana 7 pesawat dibuat di Sevilla Spanyol dan 2 pesawat dirakit di PT Dirgantara Indonesia
7. Program 6 pesawat helikopter EC 725 (2 diantaranya *full combat SAR*) pada tahun 2015.

8. Beberapa program perbaikan yang merupakan *After Sales Service* dari pengadaan pesawat.

### **Pemberdayaan PT Dirgantara Indonesia Sebagai Industri Pertahanan Guna Menjamin Kesiapan Alutsista Dalam Rangka Mendukung Tugas Pokok TNI AU**

Pemerintah saat ini dihadapkan pada persoalan yang cukup berat, ditengah keterbatasan keuangan negara, tuntutan dan harapan masyarakat bagi peningkatan kesejahteraan dan kompleksitas permasalahan pertahanan negara "memaksa" pemerintah untuk menaikkan alokasi anggaran bagi pertahanan negara, khususnya upaya memodernisasi Alutista. Marsma TNI Kukuh Sudibyanto sebagai Kadiseroau secara tegas menyatakan bahwa keterbatasan anggaran akan menghambat perkembangan industri pertahanan seperti yang dialami oleh PT Dirgantara Indonesia selama ini.<sup>16</sup>

Dari perspektif analisis kebijakan dalam upaya mengatasi kompleksitas persoalan pertahanan dihadapkan dengan keinginan kuat untuk mengembangkan kekuatan pertahanan khususnya

<sup>12</sup> Kontrak Jual Beli No.KJB/009/DN/M/1996

<sup>13</sup> Kontrak Jual Beli No.KJB/010/DN/M/1998

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Kontrak Re-Engine dan Referbusment No.KJB/019/DN/M/2000.

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Marsma TNI Kukuh Sudibiyanto, Kadisaeroau tanggal 31 Mei 2018 Pukul 09.30 WIB.

modernisasi Alutsista dan pembangunan industri pertahanan. Hal ini dikarenakan seperti ungkapan Bapak Moses dari Komisi I DPR RI bahwa Negara yang kuat harus ditopang oleh kekuatan pertahanan. Kasus PT Dirgantara Indonesia yang merupakan salah satu industri strategis di bidang kedirgantaraan patut kita jadikan pelajaran berharga agar kita dapat lebih bijak dalam menetapkan kebijakan dan pengelolaan industri yang tergolong strategis.<sup>17</sup> Menurut hasil wawancara dengan Marsma TNI Kukuh Sudibiyanto sebagai Kadisaeroau, melihat permasalahan yang terjadi PT Dirgantara Indonesia jangan sampai dimatikan, namun harus dibina dan dirangkul untuk kemajuan industri pertahanan negara kita. Memberikan pembinaan untuk bersama-sama berkembang sehingga dapat menjadi industri pertahanan yang mandiri dalam membantu TNI AU dalam rangka menjaga pertahanan NKRI.<sup>18</sup>

Secara umum dapat dijelaskan bahwa kebijakan yang baik ditentukan oleh banyak faktor diantaranya latar belakang pemikiran kebijakan tersebut, tujuan dan lingkup kebijakan, kelengkapan informasi yang diperoleh, siapa aktor-

aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan, bagaimana dampak kebijakan tersebut.

Dalam konteks kebijakan pertahanan negara, dalam banyak hal perlu adanya kesamaan persepsi antara *state actors* dan *non-state actors*. Masih banyak anggapan di masyarakat bahwa persoalan pertahanan negara merupakan tanggung jawab militer dan persoalan-persoalan militer. Anggapan tersebut jelas salah, tetapi amat sulit menemukan persamaan pandangan dan pemikiran yang sama tentang konsep pertahanan.

Konsep, sistem dan strategi pertahanan negara yang telah disepakati menurut Moses dari Komisi I DPR RI yaitu pertahanan semesta hendaknya perlu disosialisasikan sampai ke tingkat keseluruhan sistem pertahanan dan keamanan. Tanggung jawab pembangunan pertahanan negara bukan hanya domainnya Kemhan/TNI dan pemerintah pusat, namun harus didukung oleh semua komponen yang terlibat.<sup>19</sup>

Penulis mengawali analisis kebijakan ini dari bagaimana kita bisa membangun persepsi yang sama dalam melihat dan menyikapi persoalan pertahanan negara.

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Moses Caesar Assa, M.Sc TA. Komisi I DPR RI tanggal 28 Mei 2018 Pukul 13.30 WIB.

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Marsma TNI Kukuh Sudibiyanto, Kadisaeroau tanggal 31 Mei 2018 Pukul 09.30 WIB.

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Moses Caesar Assa, M.Sc TA. Komisi I DPR RI tanggal 28 Mei 2018 Pukul 13.30 WIB.

Hal ini merupakan *entrypoint* bagi publik agar dapat berperan serta dalam pembangunan dan penyelenggaraan pertahanan negara. Kita harus kembali kepada semangat sebelum kemerdekaan dan semangat mempertahankan kemerdekaan (era 1940-an s.d. 1950-an). Nilai-nilai nasionalisme itu harus tetap ditumbuhkembangkan, terlebih saat sulit sekarang ini. Persoalan-persoalan bangsa ini adalah persoalan kita semua anak bangsa. Bangsa Indonesia harus mampu bangkit dari keterpurukan, kita harus melihat bahwa perbedaan asal usul dan keragaman budaya sebagai modal dan nilai plus bangsa ini. Cita-cita yang telah dirumuskan para *founding father* bangsa harus dapat diwujudkan oleh generasi sekarang dan generasi mendatang.

Terkait dengan kebijakan-kebijakan pertahanan Negara, khususnya upaya memodernisasi Alutsista dan membangun kemandirian industri pertahanan perlu terus dikaji ulang agar dapat dirumuskan suatu kebijakan baru yang lebih komprehensif integral dan memberikan kemanfaatan yang optimal. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Nukman Iskandar dari Komisi I DPR RI, industri pertahanan tidak berorientasi pada profit. Misalnya,

PT Dirgantara Indonesia untuk saat ini berada di bawah koordinasi BUMN, sehingga Kemhan tidak dapat mengintervensi secara langsung dalam rangka mendukung tugas pokok TNI AU.<sup>20</sup> Pembangunan pertahanan Negara tidak bisa dipandang dari aspek ekonomi semata, karena memang memodernisasi Alutsista dan mewujudkan kemandirian industri strategis tidak mampu mengembalikan nilai investasi dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dalam waktu singkat.

Pembangunan pertahanan Negara harus dilihat dari seberapa besar manfaat yang dapat diperoleh jika memiliki kemampuan Alutsista yang handal, industri pertahanan yang maju dan prajurit yang profesional. Dengan demikian kemungkinan pencurian kekayaan alam terutama kekayaan laut, perebutan wilayah, penyelundupan, terorisme dan banyak lagi persoalan pelik lainnya dapat diminimalkan. Berapa besar kerugian Negara yang bisa dikembalikan jika dapat menjaga wilayah laut dari pencurian dan penyelundupan. Belum lagi sikap negara-negara tetangga dan pihak asing yang memiliki kepentingan di sekitar wilayah kelautan, akan berubah menjadi lebih

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Nukman Iskandar, S.IP, MA TA. Komisi I DPR RI tanggal 28 Mei 2018 Pukul 14.00 WIB.

menghargai. Posisi tawar Indonesia akan semakin meningkat dan keberadaannya semakin diperhitungkan dalam pergaulan dunia internasional.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan negara (pemerintah) antara lain tetap berupaya menambah alokasi anggaran pertahanan negara, terutama bagi upaya memodernisasi Alutsista dan pengembangan industri pertahanan setiap tahunnya, sehingga pada masa mendatang paling tidak Indonesia memiliki besaran alokasi anggaran pertahanan bisa mencapai dua persen dari PDB. Kebijakan Kemhan/TNI yang menekankan pembangunan pertahanan negara yang bertumpu pada *minimum essential force* menggambarkan pada realitas kondisi negara saat ini. Keterbatasan anggaran menjadi alasan pokok bagi pembangunan bidang pertahanan, khususnya modernisasi Alutsista dan pembangunan industri pertahanan. Jika dikaji lebih dalam bahwa kebijakan tersebut adalah kebijakan yang pesimistis dan kurang berani mengambil risiko. Pertanyaan berikutnya yang mungkin bisa dikedepankan adalah sampai kapan bertahan pada kebijakan tersebut? Sampai kapan Alutsista yang dimiliki saat ini mampu mendukung tugas-tugas pokok TNI? Apakah tidak mungkin

ada kebijakan baru yang lebih bijak dan berani menghadapi risiko?

Pertanyaan-pertanyaan di atas patut dikemukakan, mengingat sesungguhnya kita memiliki potensi untuk dapat lebih baik dan bangkit untuk lebih maju. Indonesia memiliki sejumlah industri strategis dan industri pendukung lainnya yang belum dikelola dengan bijak; memiliki tenaga-tenaga ahli yang handal yang kurang dihargai di negeri sendiri (lebih dihargai di luar negeri); memiliki sumber-sumber kekayaan alam dalam jumlah melimpah yang dapat dikembangkan dalam mendukung bahan baku industri pertahanan dan suku cadang Alutsista. Teknologi memang merupakan salah satu kata kunci persoalan ini, tetapi teknologi dapat dipelajari dan terbukti bahwa kita punya kemampuan untuk menguasai teknologi.

Persoalan penting yang harus dipecahkan adalah bagaimana semua pihak dapat duduk berdampingan menyamakan persepsi dan tujuan yang disertai dengan komitmen yang kuat, tidak mengedepankan kepentingan sektoral untuk membangun kekuatan pertahanan Negara yang handal. Peran serta publik amat dibutuhkan, pemerintah hanya sebagai fasilitator dan katalisator. Penentuan kebijakan tidak harus selalu diserahkan kepada pemerintah semata

sebagai satu-satunya penentu setiap kebijakan, apalagi yang bersifat strategis. Pada era demokrasi saat ini, partisipasi publik juga sangat penting bagi keberhasilan sebuah kebijakan. Salah satu kelemahan yang mungkin harus diperbaiki dan ditingkatkan dari sikap bangsa ini adalah sulitnya menerima perbedaan dan lemah dalam berkoordinasi. Manajemen negara yang baik menuntut hal itu, apalagi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang kompleks.

Khusus tentang modernisasi Alutsista dan pembangunan kemandirian industri pertahanan, pemerintah khususnya Kemhan/TNI perlu segera memperbaiki kualitas penelitian dan pengembangan (litbang) pertahanan dan meningkatkan kerjasama secara intens kepada pihak Perguruan Tinggi (PT) dan Industri (kerjasama Tripartit). Bapak Moses dari Komisi I DPR RI, salah satu upaya untuk memajukan industri pertahanan adalah memperkuat Litbang. Litbang inilah yang akan meningkatkan kualitas produk-produk yang dihasilkan oleh industri pertahanan kita.<sup>21</sup>

Upaya tersebut juga berarti bahwa perlu adanya peningkatan anggaran bagi litbang pertahanan. Kemudian mengkaji

ulang semua prosedur pengadaan sarana dan prasarana pertahanan, khususnya Alutsista TNI.

Pengadaan Alutsista sepatutnya harus melalui proses litbang dan memberdayakan industri dalam negeri. Disamping itu perlu suatu keberanian untuk mengurangi keinginan membeli Alutsista dari luar negeri serta harus ada upaya untuk memulai dan mengembangkan industri pertahanan demi mengurangi ketergantungan dengan pihak luar. Langkah yang bisa ditempuh dimulai dengan merumuskan suatu kebijakan baru tentang kemandirian industri pertahanan dengan berpegangan pada satu prinsip bahwa tidak ada pihak yang dirugikan; bila perlu pemerintah menyediakan insentif bagi litbang pertahanan maupun industri pertahanan dan pendukungnya.

### **Faktor-faktor Penyebab Sulit Berkembangnya PT Dirgantara Indonesia Sebagai Industri Pertahanan Dalam Mendukung Kemandirian Alutsista**

Dari aspek kebijakan pemerintah selama ini, terdapat sejumlah kebijakan yang justru kontraproduktif terhadap

---

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Moses Caesar Assa, M.Sc TA. Komisi I DPR RI tanggal 28 Mei 2018 Pukul 13.30 WIB.

pembangunan industri pertahanan antara lain:

1. Pembangunan industri nasional tidak dirancang secara bersinergi antara industri hulu sampai dengan industri hilir. Industri nasional selama ini lebih kepada orientasi sektoral, sehingga ketika krisis ekonomi dan moneter terjadi di Indonesia 1997-1998 banyak industri besar kolaps, yang bertahan justru industri kecil dan industri rumah tangga. Disamping itu juga terjadi miskebijakan antara Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan terkait dengan pengadaan dan modernisasi Alutsista, sehingga upaya membangun kemandirian Alutsista sulit untuk dilaksanakan. Pengadaan Alutsista dari luar negeri seperti pembelian satu skuadron pesawat tempur Sukhoi dari Rusia dengan fasilitas Kredit Ekspor (KE) justru membebani keuangan negara.
2. Selama ini industri nasional khususnya industri pertahanan sering dijadikan "alat politik" para penguasa, dimana

terjadi tarik-menarik kepentingan sehingga industri tersebut kurang dapat berkembang.

3. Kebijakan pajak, moneter dan fiskal yang diterapkan pemerintah terhadap keluar masuk barang justru menambah beban biaya produksi yang semakin tinggi. Pada masa mendatang diharapkan ada insentif dari pemerintah untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak dan bea fiskal bagi komponen dan suku cadang untuk Alutsista sehingga industri dalam negeri dapat lebih berkembang untuk mendukung produksi Alutsista.
4. Penguasaan teknologi masih terbatas sehingga ketergantungan pengguna pada produk Luar Negeri masih tinggi, spesifikasi teknis dari pengguna yang berubah-ubah, volume bisnis / jumlah order yang secara skala ekonomi belum memadai dan keberpihakan untuk memanfaatkan fasilitas dan kapabilitas dalam negeri dalam pengadaan Alutsista<sup>22</sup>.
5. Dari aspek kesiapan mesin/fasilitas produksi, secara umum industri pertahanan yang ada saat ini banyak memiliki mesin/fasilitas produksi yang sudah ketinggalan zaman, sehingga

---

<sup>22</sup> Hasil wawancara tertulis dengan Bapak Dr.Ir.Elfi Goentoro MBA Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia, pada tanggal 20 Juli 2018.

kapasitas produksi tidak optimal. Untuk melakukan modernisasi terhadap mesin/fasilitas produksi tersebut, industri kesulitan modal karena membutuhkan investasi yang sangat besar.

Faktor lainnya yang cukup menonjol selama ini yakni masih lemahnya *political will* pemerintah dan komitmen TNI untuk menggunakan produksi dalam negeri. Seperti yang dikatakan oleh Marsma TNI Kukuh Sudibyanto sebagai Kadiseroau, hendaknya “cinta produk dalam negeri” tidak hanya sebagai slogan atau retorika, tetapi harus menjadi sebuah kesadaran bersama dan sebagai gerakan nasional.<sup>23</sup> Pilihan pengadaan Alutsista dari luar negeri oleh TNI haruslah menjadi pilihan terakhir, dengan pertimbangan bahwa produk tersebut belum mampu diproduksi oleh industri dalam negeri.

Dari pihak PT Dirgantara Indonesia menyampaikan bahwa selama ini kerjasama para akademisi, BPPT, Balitbang Kemhan telah berjalan dengan baik termasuk dengan industri pertahanan itu sendiri. Kerjasama tersebut menciptakan hubungan *Triple Helix*. Kalangan akademisi dengan sumber daya, ilmu pengetahuan, dan teknologinya memfokuskan diri untuk berbagai temuan

dan inovasi yang aplikatif. Kalangan bisnis melakukan kapitalisasi yang memberikan keuntungan ekonomi dan kemanfaatan bagi masyarakat. Sedang pemerintah menjamin dan menjaga stabilitas hubungan keduanya dengan regulasi kondusif (Etzkowitz&Leydesdorff, 2000). Contoh kerjasama yang telah terjalin dengan baik yaitu pengembangan Pesawat Terbang Tanpa Awak (PTTA) Wulung, antara PT Dirgantara Indonesia, Balitbang Kemhan dan BPPT Indonesia telah berhasil mendapatkan sertifikat tipe (Type Certificate) dari Indonesian Military Airworthiness Authority (IMAA). PTTA Wulung rencananya akan dikembangkan menjadi MALE (Medium Altitude Long Endurance), namun pengembangan MALE masih terdapat beberapa kendala khususnya terkait anggaran pengembangannya. Anggaran selama ini tidak *multiyears*, sedangkan pengembangan tidak dapat ditentukan secara pasti waktu untuk menghasilkan produk terbaik. Ekspor produk PT Dirgantara Indonesia keluar negeri difasilitasi oleh program *National Interest Account* (NIA) berupa *buyers credit* atau *working capital* dimana Eximbank sebagai penyalur anggaran dari Pemerintah. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

(LPEI) atau Indonesia Eximbank menerima Penugasan Khusus dari Pemerintah melalui Keputusan Menteri Keuangan No.649/KMK.08/2017 untuk menyediakan fasilitas pembiayaan atas program ekspor pesawat terbang. Dalam rangka penetrasi dan pengembangan ekspor ke negara tujuan ekspor baru, serta untuk melaksanakan mandat Penugasan Khusus kepada LPEI, dan telah dilakukan penandatanganan pembiayaan kepada PT Dirgantara Indonesia dengan nilai sebesar Rp 354 miliar pada tanggal 31 Mei 2018 yang dilaksanakan di Jakarta. Pemasaran produk PT Dirgantara Indonesia di dalam negeri bisa mendapatkan dukungan *customer financing*, dari Bank Pemerintah namun implementasinya memerlukan adanya kebijakan Pemerintah. PT Dirgantara Indonesia dibebani pajak dan bea masuk bagi produk yang dijual kepada customer dalam negeri yang besarnya hingga 70% karena berada dalam kawasan berikat, sehingga harga pesawat PT Dirgantara Indonesia tidak kompetitif di dalam negeri.<sup>24</sup>

Kurang berkembangnya industri pertahanan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan Alutsista dan sarana pertahanan menurut Letkol Faizal

dari Srenaau juga disebabkan oleh kemampuan teknologi yang dimiliki masih tergantung kepada Negara *principal*, mengingat sebagian besar industri pertahanan masih menggunakan lisensi dalam produksinya<sup>25</sup>. Selama masih ada ego sektoral, maka kemandirian industri pertahanan sulit untuk tercapai, karena untuk mewujudkan kemandirian industri pertahanan perlu adanya satu visi dan misi hanya semata-mata bertujuan membangun industri pertahanan. Perlu adanya sinergi dari semua pihak agar kemandirian alutsista dapat terwujud.

### **Pembahasan**

Pemenuhan kebutuhan Alutsista yang modern yang akan digunakan oleh TNI dalam mengoptimalkan tugas dan fungsinya menjaga keutuhan NKRI, menjaga kedaulatan negara dan keselamatan bangsa dari segala ancaman menjadi sebuah keharusan. Upaya pemenuhan tersebut harus diarahkan dengan mengembangkan kemampuan industri dalam negeri, dengan alternatif pilihan terakhir pengadaan Alutsista dari luar negeri hanya akan diperkenankan kalau kita benar-benar butuh dan industri

---

<sup>24</sup> Hasil wawancara tertulis dengan Bapak Dr.Ir.Elfi Goentoro MBA Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia, pada tanggal 20 Juli 2018.

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Letkol Adm Faizal, Pabandyajianstra Srenaau tanggal 30 Mei 2018 Pukul 10.30 WIB.

dalam negeri belum mampu memproduksi.

Pembinaan industri pertahanan hanya mungkin dilaksanakan apabila didukung oleh kebijakan pemerintah yang memadai. Selain upaya sinergitas dan integritas diantara industrinya, juga memerlukan keterpaduan pengelolaan dengan *stakeholders* Industri Pertahanan, yakni pengguna (TNI), Pemerintah, institusi Litbang dan Perguruan Tinggi. Upaya mewujudkan pembinaan industri pertahanan ini, memerlukan suatu penataan dan pengaturan yang dapat lebih menjembatani keserasian dalam memprioritaskan kepentingan pertahanan dengan kepentingan nasional lainnya. Dengan menggunakan perangkat pengaturan yang sederhana, tegas dan kenyal, serta wujud pembangunan sistem industri yang solid, dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemberdayaan segenap kemampuan industri nasional dalam mendukung pemenuhan kebutuhan sarana pertahanan.

Salah satu perangkat pengelola industri pertahanan yang dipandang perlu untuk mendorong industri nasional menjadi lebih profesional, inovatif, efektif dan efisien serta terintegrasi dalam

memenuhi kebutuhan sarana pertahanan secara mandiri, adalah suatu perangkat lunak (regulasi) yaitu peraturan tentang Pembinaan Teknologi dan Industri Pertahanan didukung oleh Komite Kebijakan Industri Pertahanan sebagai pengambil kebijakan-kebijakan dalam upaya pembinaan.

Langkah perbaikan yang harus segera dilakukan tentunya tidak hanya dari sisi teknis saja, seperti yang dikatakan Bapak Nukman Iskandar dari Komisi I DPR RI harus dilihat dari berbagai aspek seperti yang terkait dengan regulasi, pengembangan SDM, sarana prasarana serta pemberian insentif dalam pengembangan teknologi, misalnya *counter trade* dan *offiet road mapping* teknologi (perdagangan timbal balik dalam kerangka transfer teknologi yang jelas) yang dibutuhkan oleh TNI dan kebijakan-kebijakan terkait dengan penggunaan produk dalam negeri.<sup>26</sup>

Prioritas program yang perlu segera diupayakan oleh pemerintah dalam membangun industri pertahanan adalah menyusun suatu regulasi yang substansinya mengatur industri pertahanan yang diharapkan dapat memberikan iklim yang kondusif sekaligus

---

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Nukman Iskandar, S.IP, MA TA. Komisi I DPR RI tanggal 28 Mei 2018 Pukul 14.15 WIB.

mampu mengakselerasikan industri pertahanan yang kuat. Iklim yang harus diciptakan antara lain: memadukan, mensinergikan dan menghilangkan kepentingan yang tumpang tindih, termasuk penetapan siapa yang akan menjadi industri pertahanan dan bagaimana struktur industri pertahanan yang kokoh antara lain dengan membangun sistem kluster.

Revitalisasi industri pertahanan merupakan upaya pemerintah yang tujuan pokoknya adalah untuk membangun kemandirian pertahanan negara. Agar industri pertahanan dapat mendukung sepenuhnya kemandirian tersebut tentunya perlu adanya konsistensi dan komitmen dari pengguna (TNI) untuk senantiasa menggunakan produk hasil pengembangan industri dalam negeri. Kemandirian Alutsista merupakan sebuah kondisi yang tidak bisa ditawar lagi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa jika industri pertahanan berkembang banyak dampak positif yang dihasilkannya antara lain: terjadinya peningkatan kemampuan daya tolak (*deterent effect*), peningkatan posisi tawar, penegakan kedaulatan dan hukum nasional, pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan pekerjaan.

Untuk jangka pendek dan menengah, langkah yang perlu dilakukan terkait dengan keterbatasan anggaran

antara lain: penetapan program untuk mendukung kebijakan *Minimum Essential Force* (MEF), melanjutkan perbaikan regulasi industri pertahanan dan meningkatkan kerjasama bagi pengembangan produksi. Dalam penguasaan teknologi pertahanan sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. PT Dirgantara Indonesia melalui *co-design*, *co-manufacture* dan *global supply chain* selalu memperhatikan kandungan lokal dan offset sebesar 35% dari nilai kontrak dalam pengadaan Alat Peralatan Pertahanan Keamanan (Alpalhankam) dari luar negeri sehingga PT Dirgantara Indonesia diharapkan memiliki kemampuan dalam memproduksi Alpalhankam secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Penguatan posisi industri pertahanan dalam skema Pengadaan Luar Negeri (PLN) melalui peningkatan kerjasama industri pertahanan dalam pelaksanaan UU No 16 tahun 2012 yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan sejalan dengan pengembangan industri pertahanan ke depan. Pengadaan alutsista dari luar negeri harus berbasis kepada pengembangan industri dirgantara nasional agar industri dapat mengembangkan kompetensi melalui pelatihan serta *technology acquisition* sesuai ToT yang terencana, terkawal dan

terwujud nyata PT Dirgantara Indonesia dalam merevitalisasi industri pertahanan memiliki beberapa poin prioritas untuk dibenahi yaitu:

1. Peningkatan fasilitas produksi, pengujian dan penambahan fasilitas untuk mencapai strategi pengembangan teknologi dan produk.
2. PT Dirgantara Indonesia terus meningkatkan jumlah serta kualitas dari tenaga ahli dengan melakukan rekrutmen pegawai baru dan mendidik pegawai yang sudah ada untuk menguasai kemampuan khusus sesuai kebutuhan perusahaan.
3. PT Dirgantara Indonesia turut serta dalam proses perencanaan kandungan lokal / Offset terhadap pengadaan Alpalhankam dari luar negeri dan perencanaan kerjasama industri dengan perusahaan kedirgantaraan dunia.
4. Perlu adanya dukungan pemerintah terutama dari segi permodalan.

Pihak PT Dirgantara Indonesia juga berharap dari pemerintah untuk program produksi pesawat agar harga pesawat khususnya N219 dapat kompetitif di dalam negeri, yaitu:

1. Pengecualian peraturan perpajakan dan Bea Masuk untuk produk PT Dirgantara Indonesia agar harga jual

pesawat produk dalam Negeri menjadi kompetitif di Negeri sendiri.

2. Memberikan insentif kepada maskapai berupa prioritas rute komersial pada penerbangan jarak pendek untuk pesawat N219.
3. Memberikan insentif berupa lower interest rate (subsidi bunga) untuk customer financing kepada institusi pembiayaan untuk pengadaan N219.
4. Memberikan insentif kepada maskapai melalui penambahan rute dan subsidi perintis untuk penggunaan N219 di rute perintis.

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, jelas bahwa Indonesia memiliki urgensi untuk memiliki industri dirgantara sekaligus industri pertahanan yang mandiri. Kemandirian industri dirgantara itu berarti kita dapat mengelola dan mengatur seluruh industri terkait untuk menciptakan suatu ekosistem usaha yang saling menguntungkan dengan tetap mengutamakan pemenuhan hajat hidup orang banyak. Ketika kita berbicara mengenai Industri Dirgantara, tidak hanya perusahaan manufacture saja, tetapi ada industri *Maintenance, Repair, Overhaul (MRO)*, misalnya ada Sub Direktorat Service PTDI, PT GMF, PT NTP dan masih banyak industri MRO lainnya di Indonesia. Ada pula operator yang menjalankan

operasional pesawat maupun operator penyelenggara operasional bandara, seperti PT Pelita Air Service, PT Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II. Kemudian ada Regulator seperti dari DKUPPU Kementerian Perhubungan, Indonesia Military Airworthiness Authority (IMAA) Kementerian Pertahanan, dan adapula Akademisi seperti di ITB ada Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara. PTDI dengan produk-produk unggulannya, seperti CN235-220, NC212i, CN295 dan N219 bisa menjadi perusahaan yang mampu bekerjasama dengan berbagai pihak diatas untuk menciptakan ekosistem industri dirgantara yang sehat dan menguntungkan<sup>27</sup>.

Pengembangan industri pertahanan memerlukan pelibatan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*). Unsur PT, industri dan pemerintah (*ABG-Academic, Business, Government*) merupakan tiga pilar pelaku pengembangan industri pertahanan. Ketiga pilar tersebut saat ini telah terkoordinasiokan dengan terbentuknya Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang berfungsi sebagai *bridging* (jembatan) untuk mempertemukan kepentingan antara

pengguna-pengambil keputusan-industri. Pengguna menetapkan *operational requirements* dan *technical requirements*. Industri menyiapkan dan mengembangkan teknologi serta perencanaan produksi serta pemerintah menentukan regulasi dan mengalokasikan pendanaan bagi pemenuhan kebutuhan Alutsista TNI. Kondisi ini merupakan awal yang baik dan ke depan diharapkan dapat membangun kemandirian sekaligus memberdayakan industri pertahanan, namun harus tetap menjaga komittnen bersama. Menurut Bapak Moses dari Komisi I DPR RI bahwa KKIP merupakan wadah yang bertugas untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengembangan industri pertahanan dan tentunya akan berpihak kepada industri pertahanan dalam negeri. Dalam programnya telah disusun *Grand Strategy* KKIP dan *Master Plan* Pengembangan Industri Pertahanan sebagai upaya membangun kemandirian bangsa. Melalui kedua konsep tersebut, akan terjadi sinkronisasi pemenuhan kebutuhan Alutsista melalui pemberdayaan segenap kemampuan industri dalam negeri.<sup>28</sup> Konsep ini akan memberikan akselerasi dalam proses alih teknologi untuk

---

<sup>27</sup> Hasil wawancara tertulis dengan Bapak Dr.Ir.Elfi Goentoro MBA Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia, pada tanggal 20 Juli 2018.

<sup>28</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Moses Caesar Assa, M.Sc TA. Komisi I DPR RI tanggal 28 Mei 2018 Pukul 13.30 WIB.

membangun infrastruktur dan meningkatkan kandungan lokal serta kerjasama produksi yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Keberhasilan KKIP dalam melaksanakan program akan sangat tergantung pada komitmen segenap *stakeholders*, terutama pihak pemerintah untuk tetap menetapkan kebijakan menggunakan produk dalam negeri. Penguatan posisi industri pertahanan dalam skema Pengadaan Luar Negeri (PLN) melalui peningkatan kerjasama industri pertahanan dalam pelaksanaan UU No 16 tahun 2012 yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan sejalan dengan pengembangan industri pertahanan ke depan. Pengadaan alutsista dari luar negeri harus berbasis kepada pengembangan industri dirgantara nasional agar industri dapat mengembangkan kompetensi melalui pelatihan serta *technology acquisition* sesuai ToT yang terencana, terkawal dan terwujud nyata.<sup>29</sup>

Terkait dengan kerangka pendanaan bagi pengembangan industri pertahanan dalam mendukung kemandirian Alutsista perlu dibangun skema-skema pendanaan dalam negeri, misalnya dengan pelibatan

perbankan nasional. Dengan demikian mekanisme Kredit Ekspor yang cenderung membuat ketergantungan terhadap negara *principal* dapat diminimalkan.

Satu poin penting lainnya dalam upaya untuk mempercepat kemandirian Alutsista adalah mengedepankan peran serta litbang pertahanan. Litbang pertahanan ini harus dibangun dengan mensinergikan kemampuan tiga pilar (PT, Industri dan pemerintah, termasuk TNI sebagai pengguna), membangun jaringan kerjasama (*networking*) dan komitmen bersama.

Pada Konferensi Tingkat Tinggi para Menteri Pertahanan ASEAN (ASEAN Defence 2011) pertengahan Mei disepakati pembangunan industri pertahanan bersama antar negara ASEAN, seperti yang dilakukan negara Eropa Barat dalam NATO. Esensi kesepakatan ini adalah sesama negara ASEAN akan saling melengkapi kemampuan dalam memproduksi Alutsista dan tidak saling menjatuhkan (Kompas, 19 Mei 2011).

Kesepakatan ini juga disambut baik oleh BUMNIP seperti pernyataan Dirut PT. PAL bahwa Indonesia berpotensi sebagai pemain besar dalam produksi Alutsista di kawasan pada masa mendatang. Hal ini

---

<sup>29</sup> Hasil wawancara tertulis dengan Bapak Dr.Ir.Elfi Goentoro MBA Direktur Utama PT Dirgantara Indonesiargantara Indonesiargantara

Indonesiargantara Indonesia, pada tanggal 20 Juli 2018.

dibuktikan dengan beberapa produk Alutsista kita telah diekspor ke Malaysia dan Korea Selatan seperti pesawat CN-235, kendaraan angkut personil (Armored Personnel Carrier, APC) Anoa 6x6 dan senjata SS1-V2 produk PT. Pindad. PT. PAL sendiri sedang membuat desain prototipe Kapal Patroli Cepat (*Fast Patrol Boat*) bekerjasama dengan Balitbang Kemhan dan kementerian Ristek (SINDO, 22 Mei 2011).

Industri pertahanan Indonesia memiliki peluang dan potensi yang cukup besar untuk berkembang asalkan simpul-simpul penghambat perkembangan industri tersebut dapat diminimalkan seperti deregulasi terkait revitalisasi pertahanan, adanya insentif dari pemerintah bagi industri pertahanan berupa keringan pajak, fiskal terhadap komponen suku cadang Alutsista, bantuan modal dari perbankan dan kerjasama riset dan produksi.

## **Kesimpulan**

1. Bagaimana pemberdayaan PT Dirgantara Indonesia sebagai industri pertahanan guna menjamin kesiapan Alutsista dalam rangka mendukung tugas pokok TNI AU. Perkembangan Lingkungan Strategis sangat mempengaruhi kebutuhan dan keberadaan PT Dirgantara Indonesia

yang diharapkan mampu mendukung tugas pokok TNI AU. PT. Dirgantara Indonesia diharapkan mampu melaksanakan rekayasa *engineering* dalam mendukung kesiapan operasional pesawat-pesawat TNI AU, yang didukung komitmen kerjasama dalam peningkatan peran yang maksimal. PT Dirgantara Indonesia dan TNI AU dapat melakukan kerjasama untuk pemenuhan kebutuhan Alutsista secara optimal berupa pembuatan suku cadang (komponen) alat utama system senjata maupun pemeliharaannya. Melihat dari kemampuan yang dimiliki PT Dirgantara Indonesia baik dilihat dari manajemen maupun kemampuan teknis, maka diharapkan mampu memproduksi komponen-komponen alutsista, pesawat terbang dengan berbagai ukuran yang sesuai spesifikasi yang diperlukan TNI AU.

2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan sulit berkembangnya PT Dirgantara Indonesia industri pertahanan dalam mendukung kemandirian Alutsista. Faktor-faktor utama penghambat pemberdayaan industri pertahanan dalam mendukung kemandirian Alutsista selama ini yaitu belum adanya persamaan persepsi antar pihak dalam memandang pembangunan pertahanan negara,

banyaknya kebijakan yang tidak tepat dalam pembangunan industri pertahanan dan modernisasi terhadap mesin/fasilitas produksi industri pertahanan, lemahnya *political will* pemerintah dan komitmen TNI untuk menggunakan produksi dalam negeri, dan kemampuan teknologi yang dimiliki masih tergantung kepada Negara *principal*.

### Saran

1. Pengembangan kerjasama bidang kedirgantaraan, perkapalan, teknik sipil, industri alat berat, otomotif, elektronika, dan industri nasional lainnya.
2. Guna mewujudkan optimalisasi peran PT Dirgantara Indonesia dalam rekayasa industri guna mendukung pertahanan negara aspek udara disarankan agar TNI khususnya TNI Angkatan Udara mengambil sikap proaktif dalam merumuskan bentuk kerjasama yang sinergis sehingga berdayaguna dan berhasilguna. Selain itu juga perlu untuk mensinergikan peran PT Dirgantara Indonesia dengan dibentuk suatu organisasi (*ad hoc*) untuk mewadahi 2 lembaga antara TNI AU dengan PT Dirgantara Indonesia agar tidak terjadi overlapping dari dua kepentingan melalui pengawasan

Departemen Perindustrian dan Departemen Pertahanan RI.

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang desain dan *engineering*, meliputi keahlian dan kemampuan mengembangkan dan pembuatan pesawat angkut militer, pesawat misi khusus, kapal patroli cepat, kapal perang, kendaraan tempur militer, sistem senjata, sistem jaringan komunikasi, pusat komando dan pengendalian serta sistem informasi. TNI AU telah mendidik personelnnya di ITB dan lembaga pendidikan lainnya dalam bidang teknik *aeronautica* dan personel mekanik serta JMU yang berada di satuan memiliki keahlian dan pengalaman yang cukup mahir dalam bidangnya. PT Dirgantara Indonesia yang saat ini masih kekurangan tenaga ahli dapat bekerja sama dengan TNI AU dengan mekanisme penugasan ataupun bagi dapat merekrut personel TNI AU yang telah pensiun dan memiliki keahlian yang dibutuhkan oleh PT Dirgantara Indonesia
4. Guna mewujudkan optimalisasi peran PT Dirgantara Indonesia dalam rekayasa industri guna mendukung pertahanan negara aspek udara disarankan agar TNI khususnya TNI Angkatan Udara mengambil sikap

proaktif dalam merumuskan bentuk kerjasama yang sinergis sehingga berdayaguna dan berhasilguna.

5. Guna mewadahi kebutuhan modal PT Dirgantara Indonesia maka diperlukan skema khusus dalam proses pengadaan alutsista TNI yaitu melalui pengadaan *multi years* serta pengadaan alutsista langsung dalam jumlah cukup banyak sehingga dapat diperoleh *lead time product* pada komponen dan mempercepat pengadaan alutsista.

#### Daftar Pustaka

- Abu Hurairah, 2008, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan yang Berbasis Kerakyatan*, Bandung: Humaniora.
- Abubakar Busro & Abu Daud BusroH, 1984, *Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Adi Fahrudin, 2012, *Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*, Bandung: Humaniora.
- Andrianto, Tuhana Taufiq. 2015. *Paradigma Baru Bela Negara: Implementasi dan Pengembangannya di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Global Pustaka Utama.
- Anggota IKAPI, 2014, *UU No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*, Bandung: Fokus Media.
- Asshiddiqie, Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Conni Rahakundini Bakrie, 2007, *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Dasril Radjab, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Reineka Cipta).
- Hamid Darmadi, 2013, *Urgensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, Bandung: Alfabeta.
- Imam Gunawan, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Sudarsono, 2008, *Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia*, Jakarta, Departemen Pertahanan Republik Indonesia.
- Sugiyono, 2010, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Syahrin Harahap dan Hasan Bakti Nasution, 2000, *Islam dan Reformasi TNI*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Yanti Yanuar, 2015, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Agung Media.